

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Koperasi di Indonesia pada saat ini masih akan terus berkembang dan menjadi salah satu sektor ekonomi yang penting. Koperasi akan tetap menjadi alternatif untuk masyarakat dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Sebagai sektor ekonomi yang penting, koperasi di Indonesia memiliki peran yang strategis dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antar masyarakat. Koperasi di Indonesia pada tahun 2022 masih didominasi oleh pulau Jawa, dengan tiga teratas yaitu Jawa Barat sebanyak 16.151 koperasi, Jawa timur sebanyak 14.777 koperasi, dan Jawa Tengah 12.829 koperasi.

Koperasi merupakan suatu badan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota secara khusus dan masyarakat secara umum. Koperasi didirikan dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota sehingga anggota menjadi prioritas utama dalam meningkatkan kesejahteraan berdasarkan prinsip kesetaraan hak dan tanggung jawab antara anggota.

Koperasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 1 ayat 1 Menjelaskan bahwa:

**“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”.**

Tujuan koperasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang perkoperasian Pasal 3, yang berbunyi:

**“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945”.**

Menurut (Wahyuningsih, 2022), sebagai badan usaha/lembaga ekonomi atau perusahaan, maka koperasi harus bekerja atau beroperasi untuk mencapai tujuan utamanya yaitu memperoleh laba, tetapi karena dalam beroperasi koperasi mempunyai prinsip-prinsip yang berbeda dengan badan usaha lainnya, maka dalam memperoleh laba dan penggunaan laba tersebut harus juga berdasar pada prinsip-prinsip koperasi yang mendasari semua aktivitas dan perilaku dalam berusaha.

Pada suatu koperasi tentu saja harus ada pengendalian internal untuk meminimalisir kekeliruan serta kecurangan yang mungkin saja terjadi. Menurut (COSO, 2013), pengendalian internal adalah proses yang melibatkan anggota organisasi. Pengendalian internal sebagai proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan. Menurut (Defrianto et al., 2018), pengendalian internal merupakan bagian terpenting dalam suatu organisasi, dimana pengendalian internal yang mengontrol seluruh aktivitas guna mencegah penyimpangan-penyimpangan yang kemungkinan bisa terjadi dalam kegiatan operasional organisasi tersebut. Menurut (Warren et al, 2019), mendefinisikan bahwa pengendalian internal adalah standar yang digunakan organisasi dalam mendesain, menganalisis, dan mengevaluasi pengendalian internal.

Menurut (COSO, 2013), tujuan pengendalian internal yakni Efektivitas dan efisiensi operasi, realibilitas pelaporan keuangan, dan kesesuaian dengan aturan dan regulasi yang ada. Tujuan operasi sebagai penjagaan aset dari kerugian, tujuan pelaporan sebagai upaya dalam transparansi dalam kegiatan pengendalian internal, dan tujuan kepatuhan menjelaskan bahwa pengendalian internal berkaitan dengan ketaatan pada hukum dan peraturan. Sedangkan menurut (Warren et al, 2019), tujuan pengendalian internal adalah menyediakan keyakinan yang memadai bahwa aset telah dilindungi, informasi dan keuangan, karyawan dan manajer mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Pengendalian internal dapat melindungi aset dari pencurian, kecurangan, penyalahgunaan, dan kesalahan penempatan.

Di era globalisasi terdapat persaingan koperasi yang cukup ketat, di Indonesia koperasi masih terus berkembang. Hal ini dapat dilihat dari semakin bertambah dan meningkatnya skala koperasi di setiap tahun. Akan tetapi dalam perkembangannya tentu akan mendapatkan berbagai masalah yang dihadapi, dengan bertambah dan berkembangnya koperasi maka pengurus koperasi tidak dapat melaksanakan tugasnya sendiri, kondisi tersebut menyebabkan pengurus harus memberikan sebagian tugas dan wewenang dari tanggung jawabnya kepada karyawan yang dipercayai dengan tujuan membantu dan mengelola koperasi sesuai jabatan yang diberikan. Sehingga koperasi dapat lebih baik dan kompeten dalam melakukan aktivitas perkoperasian. Banyak aktivitas yang terjadi di koperasi, dan salah satu yang memerlukan pengendalian internal yang baik adalah penerimaan dan pengeluaran kas.

Untuk menciptakan pengendalian internal yang baik, manajemen koperasi harus menetapkan tanggung jawab secara jelas dan tiap orang memiliki tanggung jawab untuk tugas yang diberikan. Apabila perumusan tanggung jawab tidak jelas dan terjadi suatu kesalahan, maka sulit untuk mencari siapa yang bertanggung jawab atas kesalahan tersebut.

Pada Koperasi Konsumen Karyawan dan Mantan Karyawan (KKMK) “Kamola”, terdapat rangkap jabatan secara operasionalnya yaitu pengawas yang terjun langsung sebagai kasir di setiap unit usaha, pengawas tidak seharusnya terjun langsung ke dalam operasional seperti kasir, karena dapat menimbulkan karyawan kurang memiliki kesempatan untuk mengambil inisiatif dan mengembangkan keterampilan mereka, serta dianggap kurang menghormati kompetensi karyawan.

Peran pengawas dalam pengendalian internal kas di koperasi untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan keandalan pengelolaan kas koperasi. Pengawas berfungsi sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan mengawasi proses pengendalian internal kas koperasi. Berikut adalah peran dari pengawas dalam pengendalian internal kas:

1. Audit internal yaitu pengawas melakukan audit internal secara berkala untuk mengevaluasi pengendalian internal kas koperasi. Audit ini melibatkan pemeriksaan dan penilaian terhadap prosedur pengelolaan kas, kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur, serta identifikasi potensi risiko dan masalah.
2. Verifikasi transaksi yaitu pengawas memverifikasi setiap transaksi kas yang signifikan atau yang memerlukan otorisasi khusus. Pengawas memastikan bahwa transaksi tersebut didukung oleh bukti yang sah dan telah diotorisasi dengan benar.
3. Rekonsiliasi bank yaitu pengawas memastikan bahwa proses rekonsiliasi bank dilakukan secara rutin dan akurat.
4. Pemantauan penggunaan dana yaitu pengawas memantau penggunaan dana koperasi untuk memastikan bahwa pengeluaran dilakukan sesuai dengan tujuan koperasi.
5. Evaluasi kebijakan dan prosedur yaitu pengawas membantu mengevaluasi efektivitas kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan terkait pengelolaan kas. Jika ada kebijakan yang perlu diperbarui atau disempurnakan, pengawas memberikan masukan dan rekomendasi.
6. Pelaporan hasil pengawasan yaitu menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada manajemen. Laporan ini mencakup temuan, rekomendasi, dan langkah-langkah perbaikan yang disarankan.
7. Kepatuhan dengan aturan dan peraturan yaitu pengawas memastikan bahwa koperasi mematuhi aturan dan peraturan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan dan peraturan lainnya yang berlaku.
8. Edukasi dan pelatihan yaitu pengawas juga dapat memberikan edukasi dan pelatihan kepada anggota koperasi, karyawan, dan manajemen tentang pentingnya pengendalian internal dan peran mereka dalam menjaga integritas keuangan koperasi.

Maka dari itu peran pengawas dalam pengendalian internal kas sangat penting untuk menjaga kepercayaan anggota dan pemangku kepentingan lainnya terhadap koperasi, serta membantu melindungi kekayaan dan aset koperasi dari risiko dan penyalahgunaan.

Salah satu yang rawan disalahgunakan oleh karyawan adalah aset berupa kas, baik itu dana kas maupun dana yang ada di bank. Menurut (Martiani et al, 2017), mendefinisikan bahwa kas merupakan aset keuangan yang siap dipakai dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional yang ada di organisasi. Dimana kas merupakan aset yang paling likuid karena dapat digunakan untuk membayar kewajiban di organisasi. Sedangkan menurut (Vica et al., 2021), kas yaitu aset yang berbentuk uang tunai yang dipegang langsung oleh pihak organisasi dan disimpan di bank dapat digunakan untuk kegiatan organisasi.

Karena sifat kas yang likuid, maka mudah digelapkan, sehingga diperlukan pengendalian internal untuk mengelolanya, dengan memisahkan fungsi-fungsi penyimpanan, pelaksanaan, dan pencatatan. Terdapat dua aktivitas keuangan dalam transaksi kas yaitu penerimaan kas dan pengeluaran kas.

Menurut (Anthony et al, 2019), penerimaan kas adalah komponen penting dari siklus akuntansi. Penerimaan kas mencakup penerimaan uang tunai dari penjualan produk atau jasa, pembayaran utang dan sumber-sumber pendapatan lainnya. Sedangkan Menurut (*International Cooperative Alliance* atau ICA, 2020), pengeluaran kas dapat meliputi pembelian bahan baku, gaji dan upah karyawan, pembayaran beban operasional, investasi dalam aset tetap, pembayaran utang, dan pembagian sisa hasil usaha kepada anggota koperasi.

Koperasi Konsumen Karyawan dan Mantan Karyawan (KKMK) “Kamola”, yang bertempat di Jl. Rancaekek – Majalaya No. 79 Desa Majasetra Kec. Majalaya, Kab. Bandung. Koperasi KKMK “Kamola” merupakan koperasi yang dapat mengembangkan perekonomian nasional di Indonesia, Koperasi KKMK “Kamola” terdapat tiga pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Koperasi KKMK “Kamola” dengan Badan Hukum No.

10427/BH/KW/KOP/1992 Tanggal 02 Februari 1992 dan 10427/BH/PAD/518-KOP/X/2020 Tanggal 02 Oktober 2020, pada tahun 2022 Koperasi KKMK “Kamola” yang anggotanya terdiri dari karyawan dan mantan karyawan PT. Kamola dengan jumlah anggota pada 2022 sebanyak 517 anggota, dengan anggota aktif sebanyak 500 anggota dan anggota tidak aktif sebanyak 17 anggota. Terdapat tiga unit usaha di Koperasi KKMK “Kamola” yaitu:

1. Unit usaha simpan pinjam.
2. Unit Perdagangan.
3. Unit Jasa (pembayaran listrik dan fotokopi).

Pengendalian internal yang baik terhadap kas memerlukan unsur-unsur yang memadai untuk melindungi kas. Ketika pengendalian internal tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya, maka akan menurunkan kepercayaan anggota dan pelanggan terhadap koperasi sehingga akan berdampak pada penurunan kas serta akan menghilangkan transparansi dalam aktivitas keuangan.

Unsur-unsur pengendalian internal menurut (COSO, 2013), terdapat lima unsur pengendalian internal yaitu:

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian risiko (*risk assesment*)
3. Aktivitas pengendalian
4. Pengawasan
5. Informasi dan komunikasi

Terdapat beberapa faktor internal yang mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran kas di koperasi diantaranya sebagai berikut:

1. Manajemen keuangan koperasi sangat mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran kas. Pengelolaan dana yang baik dan pemantauan yang cermat dapat membantu mengelola kas dengan lebih efisien.
2. Struktur organisasi yaitu bagaimana koperasi beroperasi dan bagaimana tugas serta pembagian tanggung jawabnya, karena dengan adanya struktur organisasi yang jelas dapat membantu menghindari kebingungan dalam pengambilan keputusan keuangan.
3. Kebijakan pengeluaran yaitu koperasi harus memiliki kebijakan pengeluaran yang ditetapkan dengan baik. Hal ini meliputi batasan pengeluaran, pemberian persetujuan, dan pengawasan yang ketat terhadap pengeluaran kas.
4. Pengendalian internal yang kuat dapat membantu mencegah penyalahgunaan dana atau kecurangan yang dapat mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran kas.

Dari uraian latar belakang di atas peneliti menemukan beberapa kesamaan yang mengacu kepada jurnal dengan penelitian terdahulu. Penelitian pertama diteliti oleh (Sumurung et al, 2015) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengendalian internal penerimaan dan pengeluaran kas pada PT. Manado Media Grafika pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dengan adanya pembagian tugas pada masing-masing bagian, dalam penerimaan maupun pengeluaran kas telah menggunakan prosedur-prosedur yang dibuat sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan.

Penelitian ke dua diteliti oleh (Harared & Heriyanto, 2022) hasil penelitiannya menjelaskan bahwa efektivitas pengendalian internal dari kegiatan pengeluaran dan penerimaan kas pada klinik X berjalan dengan efektif, namun masih terdapat beberapa kelemahan yakni tidak terdapat prosedur dan kebijakan tertulis mengenai penerimaan dan pengeluaran kas, dokumen pendukung pengeluaran kas yang kurang lengkap, pengolahan informasi dan dokumen yang sebagian besar masih dilakukan secara manual, belum adanya pemisahan tugas antara fungsi penerimaan dan fungsi pencatatan. Hal ini dapat menimbulkan

celah bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan manipulasi dalam kegiatan transaksi keuangan klinik X.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik ingin melakukan penelitian mengenai **“Analisis Pengendalian Internal Kas Menggunakan Metode Committee of Sponsoring Organizations (COSO)”**. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memastikan bahwa kas pada koperasi KKMK Kamola terhindar dari risiko penyalahgunaan, kecurangan, efektif, dan aman.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengendalian internal kas pada Koperasi Konsumen Karyawan dan Mantan Karyawan (KKMK) “Kamola”.
2. Bagaimana upaya perbaikan pengendalian internal kas pada Koperasi Konsumen Karyawan dan Mantan Karyawan (KKMK) “Kamola”.

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini yaitu untuk memperoleh gambaran tentang pengendalian internal kas pada Koperasi Konsumen Karyawan dan Mantan Karyawan (KKMK) “Kamola”.

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah yang dikemukakan, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Tentang pengendalian internal kas pada Koperasi Konsumen Karyawan dan Mantan Karyawan (KKMK) “Kamola”.

2. Upaya perbaikan pengendalian internal kas pada Koperasi Konsumen Karyawan dan Mantan Karyawan (KKMK) “Kamola”.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian yang telah dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

##### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu perkoperasian dan fungsi pengendalian internal kas yang terjadi di koperasi khususnya mengenai pengendalian internal kas.

##### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Diharapkan dari hasil penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan terkait dengan pengendalian internal kas di Koperasi Konsumen Karyawan dan Mantan Karyawan (KKMK) “Kamola”, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung. Serta sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

